

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara ekonomi dan sosial secara proporsional untuk ketiga pihak sehingga pembangunan dapat berlangsung secara Simetris-Trilateral, Co-existensi, sustainability dalam waktu yang tidak terbatas.

Bab. II. Tinjauan Pustaka.

Sistem pembangunan perkebunan di Indonesia terpolarisasi menjadi dua kutub. Kutub sistem Perkebunan besar dan kutub sistem Perkebunan rakyat. Keduanya hanya dibedakan dalam hal kombinasi faktor produksi seperti tanah, teknik, produksi, tenaga kerja dan manajemen (Beckford, 1972, Birowo, 1984).

Perkebunan rakyat dicirikan oleh berbagai kelemahan; pengusahaan agraria pada lahan sempit, teknologinya secara tradisional, produktifitasnya rendah dan mutunya rendah, produksinya tidak teratur. Perkebunan besar dicirikan dengan berbagai kekuatan dan kelebihan yaitu: pengusaanya pada agraria lahan yang luas, menggunakan teknologi modern, produktivitas tinggi, mutu hasil tinggi, kontinuitas hasil tinggi dan efisiensi dalam biaya produksi (Mubyarto 1985, Mills, 1986, 1987, Stocker, 1987).

Perbedaan dua kutub pemikiran pun terjadi, masing masing pihak bertahan pada konsep pemikirannya: Kubu pertama menilai secara makro, sistem perkebunan besar telah memberikan keuntungan kepada negara atas produksi dan nilai tambah yang dihasilkannya (Floering, 1984:15), Sistem perkebunan besar berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi nasional (White, 1990). Kubu kedua; perkebunan besar justru bersifat anti pembangunan dan menyebabkan kemiskinan kronis di Pedesaan Beckford (1972). Perkebunan besar tidak memberikan kesejahteraan, kepada buruh dan keluarganya. tidak mampu mendorong perkembangan ekonomi lokal. Sistem perkebunan besar lebih menunjukkan sifat anti pembangunan, tidak memiliki kaitan (*linkages*) yang berarti dengan perekonomian sekitarnya, Saith (1989). Bahkan mengambil alih tanah-tanah yang sebelumnya dikuasai rakyat (Fauzi, 1999)

Menurut Goldsmith dalam Gunawan (1995) upaya perbaikan hubungan antara perusahaan dengan rakyat tersebut ditempuh melalui interaksi antara *Satelite Farming* yang merupakan petani kecil dengan *Corporate Core* yang merupakan perusahaan agroindustri yang berada di tengah petani. Implementasi yang dilakukan pemerintah Orde Baru di Indonesia dengan melakukan; pertama upaya pembangunan perkebunan yang melibatkan masyarakat lokal dengan pendekatan: (a). Peningkatan produksi bersama; (b). Peningkatan fasilitas perkebunan; (c). Sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (Tjondronegoro, 1999); Kedua melakukan tiga pola pembangunan yaitu: (a). Perkebunan Inti Rakyat (PIR), kemitraan usaha perusahaan perkebunan besar sebagai inti, dan petani sebagai plasma. (b). Pola Unit Pelayanan Pengembangan (UPP) dimana teknologi dalam proses

pengembangannya.(c). Pola Swadaya, kebun dibangun masyarakat dan memperoleh pembinaan dan penyuluhan dari pemerintah.

Berdasarkan kajian literatur terhadap pembangunan perkebunan dari perspektif agraria di Indonesia dimana antara subjek agraria sebagai pelaku pembangunan perkebunan (Pemerintah, Perusahaan Besar Swasta selaku Inti) selalu berada pada interaksi ekonomi, sosial dan *land tenure* yang strukturnya lebih tinggi, sedangkan” rakyat” yang merupakan masyarakat petani pedesaan berada pada struktur bawah dalam system pembangunan perkebunan. Mereka memiliki akses minimal kepada sumberdaya agraria. Agraria perkebunan selalu diwarnai konflik sesama subjeknya.

Hubungan antara Subjek agraria sekaligus *Stake Holders* pembangunan perkebunan yaitu Pemerintah, Perusahaan Swasta dan Rakyat adalah A-Simestris. Diduga tidak terjadi pembagian ruang yang seimbang pada strukturnya, akibatnya mulai dari material input, tahapan proses, material *output* serta *outcome* perkebunan, menunjukkan sebuah ketimpangan, system cenderung mengabaikan fungsi hak dan kewajiban yang seharusnya diterima dan diberikan masing masing pihak.

Bab. III. Metode Penelitian

3.1. Tipologi Penelitian

Penelitian ini merupakan gabungan survei dan studi kasus serta analisa data sekunder. Penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang menggambarkan variabel independen yaitu: X1 (luas lahan), X2 (pola pengelolaan lahan), X3 (Kondisi Fisik Lahan), X4 (Konversi lahan) dan variabel dependen Y (hasil produksi bersih petani)

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Riau dengan studi kasus konflik perkebunan yang berbasiskan agraria, antara pemerintah, Perusahaan Swasta dan Rakyat pembangunanya melalui Kemitraan Pemerintah, Perusahaan perkebunan dan Rakyat di kabupaten Kuantan Singingi. Objek penelitian adalah Wilayah Perkebunan Rakyat Pola kemitraan PIR dan pola